



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Saling Lempar Tanggung Jawab

Penetapan APBD 2020 Terancam Molor

JAKARTA - Kisruh anggaran di Kebijakan Umum Anggaran Penetapan Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) berbuntut saling lempar kesalahan. Kali ini, legislatif menilai esekutif sengaja menyodorkan draft anggaran tahun 2020 itu di menit terakhir.

Kekesalan legislator itu karena untuk melakukan pembahasan yang nilainya puluhan triliun rupiah itu dilakukan menjelang finalisasi. Sehingga, pengawasan anggaran bisa dinilai lemah dan tidak efektif.

Atas polemik itu, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, kedua lembaga itu seperti tidak ada yang mau disalahkan. Akhirnya, mereka saling lempar atas keterlambatan pembahasan draft APBD tahun 2020. "Padahal, Pemprov DKI itu memang dikenal kerjanya lambat," ujar dia, Kamis (7/11/2019).

Uchok menambahkan, kini penetapan APBD 2020 dipastikan molor. Apalagi, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang sampai sekarang masih melakukan pengawasan dan pembacaan KUA PPAS APBD bakal menyita waktu. "Harus ditunggu, publik pun harus bisa mengetahui apa saja isi dari rancangan belanja tahun depan nanti," jelas dia.

Bahkan, kata dia, bila PSI ditinggalkan semata-mata untuk melakukan pengesahan, takan berdampak negatif. Mereka (PSI) bisa saja mengadukan masalah ini ke Mendagri, dan resikonya bisa dicoret anggaran DKI. "Harus ditunggu dulu, setelah pembahasan ini semua selesai barulah finalisasi," kata dia.

Sementara itu, bola panas itu ditanggapi Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.

Dia membantah telah terlambat memberikan dokumen APBD tahun 2020 kepada DPRD DKI. Sebab, dokumen itu sudah dikirim sejak tanggal 5 Juli 2019. Sayangnya, dokumen itu mengendap cukup lama tanpa dilirik sedikitpun oleh anggota dewan karena tengah sibuk menghadapi Pemilu 2019.

"Ada kok bukti tanda terimanya yang kita kasih tanggal 5 Juli 2019. Kemudian ketika memasuki bulan Oktober kita ingatkan lagi, dengan cara bersurat ke DPRD agar draft KUA PPAS yang sudah dikirim bisa segera dibahas," kata dia, Kamis (7/11/2019) ■

Bahkan, kata Saefullah, surat yang dilayangkan di Oktober 2019 itu sudah dua kali untuk segera dibahas KUA PPAS. Sebab, kata dia, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 33/2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020, KUA PPAS harus selesai dibahas dan disepakati untuk menjadi Rancangan APBD pada Agustus. "Kita sudah taati waktunya, dimana minggu kedua di bulan Juli 2019 itu harus sudah masuk draft KUA PPAS disana," imbuh dia.

Makanya, Saefullah seolah tak terima bila dikatakan belum mengirim draft KUA PPAS tahun 2020 kepada Ketua DPRD DKI Jakarta. Bahkan, untuk membuktikannya, dia langsung mengklarifikasi kepada kesekretariatan DPRD. "Saya langsung telepon Sekretaris Dewan (Setwan), ternyata dia bilang draft KUA PPAS sudah di meja pimpinan semua," tambah dia.

Meski begitu, dia berharap kepada seluruh anggota DPRD agar bisa mempercepat pembahasan KUA PPAS. Sebab, tengat waktu batas pengesahan APBD tahun 2020 semakin sempit. "Tanggal 30 November APBD harus disahkan. Karena Desember 2019 itu harus dikirimkan ke Kemendagri dan dievaluasi selama 15 hari, dan dikirimkan kembali ke sini untuk direvisi sesuai evaluasi tersebut," tandas dia.

Triliunan PMD untuk Tujuh BUMD Berjalan Mulus

Di tengah kesemrawutan penyusunan anggaran, ternyata Komisi B DPRD DKI Jakarta menyepakati usulan penyerahan modal daerah (PMD) untuk tujuh Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD) sebesar Rp9,89 triliun. Namun, satu dari empat proyek Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya ditolak.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, pihaknya selalu mengingatkan tujuh BUMD yang mengajukan usulan PMD agar penyerahannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Harapannya, modal tersebut dapat meningkatkan keuntungan perusahaan.

"Kami ingin setiap rupiah yang dikeluarkan bermanfaat dengan baik. Untuk kegiatan maupun anggaran yang memang bisa ditunda, bisa diajukan lagi pada tahun berikutnya," ungkap dia kepada INDOPOS di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019).

Aziz menjelaskan, BUMD juga harus bisa melakukan efisiensi sesuai dengan prinsip bisnis yang artinya modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan profit yang besar. "Pengecualiannya adalah hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan rakyat dengan harga terjangkau," jelas dia.

Aziz berharap, ketujuh BUMD tersebut dapat menyiapkan materi paparan yang lebih lengkap dan mendetail karena akan ada pembahasan lagi terkait dengan usulan PMD dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) besar.

"Ke depan, kami juga akan melakukan pengecekan langsung ke masing-masing BUMD untuk menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan," tutur dia.

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mengutarakan, setelah melewati pembahasan yang cukup panjang, pihaknya sepakat menghapus satu dari empat proyek dari usulan PMD PAM Jaya.

BUMD DKI yang bergerak di bidang pengelolaan air bersih itu, kata politikus PDI Perjuangan-

an, mengusulkan PMD untuk tahun 2020 sebesar Rp1,77 triliun untuk pelaksanaan empat program strategis peningkatan pelayanan air bersih di ibu kota.

Namun, sambung Pandapotan, pihaknya hanya menyetujui tiga program strategis saja. Yakni pertama, program peningkatan cakupan pelayanan melalui pembangunan Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) dan pengembangan jaringan sebesar Rp 764,7 miliar.

Anggaran sebesar itu akan dialokasikan untuk pembangunan SPAM Pesanggrahan Tahap II sebesar Rp 195 miliar. reinforcement dan extention jaringan transmisi dan distribusi sebesar Rp 275 miliar; pembangunan SPAM Ciliwung/Pejaten sebesar Rp 250 miliar dan supply ke area Pegadungan-BP dan reservoir Cikokol sebesar Rp 26,7 miliar.

Program kedua, lanjutnya, pembiayaan program ketahanan pelayanan air bersih sebesar Rp310 miliar. Dengan rincian, relokasi pipa akibat terkena proyek pemerintah seperti proyek MRT tahap dua dan proyek pemerintah lainnya sebesar Rp30 miliar. Serta relokasi SPAM Cilandak sebesar Rp280 miliar.

"Program ketiga, pelayanan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR, Red) sebesar Rp15 miliar. Sedangkan program strategis yang dicoret adalah pembangunan pipa distribusi SPAM Jatiluhur tahap I sebesar Rp700 miliar. Dengan begitu, nilai PMD PAM Jaya yang dimasukkan dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS, Red) APBD DKI 2020 berkurang menjadi Rp1,07 triliun," paparnya.

Pandapotan menyatakan, penghapusan program pembangunan pipa distribusi SPAM Jatiluhur tahap 1 dikarenakan terjadi efisiensi anggaran. Sehingga eksekutif dan legislatif berupaya menyesuaikan

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Saling Lempar Tanggung Jawab

efisiensi anggaran yang disebabkan terjadinya defisit anggaran. "Selain itu, PAM Jaya bilang untuk program tersebut belum sangat dibutuhkan. Kemungkinan di APBD Perubahan bisa diajukan kembali. Nanti mungkin akan diusulkan lagi," imbuh dia.

Sementara itu, Direktur Utama PAM Jaya Priyatno Bambang Hernowo mengatakan, pihaknya dapat menerima keputusan Komisi B yang menghapus salah satu dari empat program strategis PMD dari Rancangan KUA-PPAS APBD DKI 2020. "Itu nanti akan kita ajukan lagi ke APBD Perubahan. Program ini kan kita ajukan masuk dalam PMD kita, dikarenakan ada keterkaitannya dengan pusat. bagaimana hasil dari SPAM Jatiluhur yang dibangun pemerintah pusat bisa langsung kita distribusikan. Kita tidak ingin terjadi perlambatan. Makanya kita akan masukkan di anggaran perubahan 2020," jelas dia. (dny/aen)

MODAL DAERAH UNTUK BUMD (RP9,89 TRILIUN)

PT Jakarta Propertindo	Rp4,61 triliun
------------------------	----------------

PT MRT Jakarta	Rp2,64 triliun
----------------	----------------

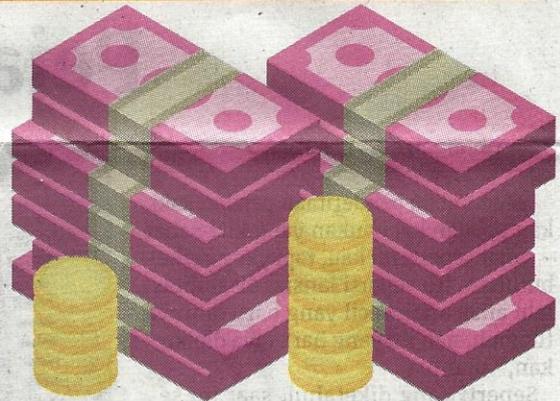
PDAM Jaya	Rp1,07 triliun
-----------	----------------

Perumda Pembangunan Sarana Jaya	Rp999,88 miliar
---------------------------------	-----------------

PD Pasar Jaya	Rp337,57 miliar
---------------	-----------------

PT Food Station Tjipinang Jaya	Rp150 miliar
--------------------------------	--------------

PT Jakarta Tourisindo	Rp92,19 miliar
-----------------------	----------------



ANGGA GUMELAR/INDOPOS